



---

## Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

Putri Agustin Pakaya<sup>1</sup>, Tety Thalib<sup>2</sup>, Andi Yusuf Katili<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [putripakaya626@gmail.com](mailto:putripakaya626@gmail.com)

---

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 22 Juli 2025

---

### ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that remains a major challenge in Indonesia's social development, prompting the government to launch various assistance programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This study aims to analyze the data collection mechanism of PKH in Biawu Village, South Kota District, Gorontalo City, focusing on data collection, verification, and beneficiary data updates. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the PKH data mechanism in the area has not been running optimally, marked by weak community participation in reporting data changes, low integration of information systems, and ineffective coordination between facilitators and local policymakers. These findings highlight the need for systemic improvements through human resource capacity development, digital system modernization, and routine evaluations to ensure more accurate, equitable, and sustainable social assistance distribution.

**Keywords:** Poverty, Family Hope Program, Social Assistance Data

### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang terus menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk meluncurkan berbagai program bantuan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendataan PKH di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan fokus pada proses pengumpulan data, verifikasi, dan pembaruan data penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan PKH di wilayah tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pelibatan masyarakat dalam pelaporan perubahan data, rendahnya integrasi sistem informasi, serta kurangnya efektivitas koordinasi antara pendamping dan pemangku kebijakan lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistemik melalui peningkatan kapasitas SDM, pembaruan sistem berbasis digital, dan evaluasi rutin untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Pendataan Bantuan Sosial

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan utama bagi berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakmampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang memadai. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi material masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada martabat, kesehatan mental, serta stabilitas sosial secara umum. Kemiskinan sering kali menjadi indikator kegagalan sistemik dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara merata dan adil, sehingga menuntut adanya intervensi kebijakan yang tepat sasaran, terstruktur, dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin agar mereka memperoleh akses lebih baik terhadap layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan insentif finansial yang terikat pada kepatuhan terhadap persyaratan tertentu, PKH tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga bersifat preventif dan promotif dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Namun, efektivitas program PKH sangat bergantung pada akurasi dan integritas data penerima manfaat. Ketepatan sasaran menjadi isu sentral dalam pelaksanaan program ini. Pendataan yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, baik karena adanya data ganda, data yang tidak diperbarui, maupun karena adanya manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendataan yang tidak hanya komprehensif dan transparan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat penerima manfaat, termasuk perubahan status sosial ekonomi keluarga.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan PKH terletak pada mekanisme pendataan. Misalnya, verifikasi data yang lambat, pembaruan data yang tertunda karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi, serta minimnya koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah daerah. Padahal, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas informasi yang mendasari proses perencanaan dan distribusi bantuan. Oleh karena itu, aspek pendataan seharusnya menjadi prioritas dalam perbaikan kebijakan sosial.

Di sisi lain, mekanisme pendataan yang baik harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga pembaruan data secara berkala. Proses ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, pendamping PKH, serta masyarakat itu sendiri. Pendamping memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan kebijakan dengan realitas di lapangan, sementara masyarakat diharapkan bersikap partisipatif dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang benar. Implementasi teknologi informasi juga menjadi peluang

---

untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data program bantuan sosial ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pendataan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu proses pengumpulan data, verifikasi data, dan pembaruan data, guna mengevaluasi sejauh mana ketiga komponen tersebut telah berjalan secara optimal dalam mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi terhadap data-data pendukung yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menggambarkan bagaimana proses pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data PKH dilakukan di lokasi penelitian. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Keluarga Harapan di Tingkat Lokal**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat. Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan bersyarat yang menysasar bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di tingkat lokal, implementasi PKH tidak terlepas dari struktur birokrasi dan kesiapan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Peran aktif pemerintah kelurahan dan pendamping PKH menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan program ini.

Dalam implementasinya, program ini telah mencakup berbagai komponen sasaran seperti ibu hamil, anak usia sekolah, dan lanjut usia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam aspek ketepatan sasaran dan pemutakhiran data. Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum secara aktif melaporkan perubahan kondisi sosial ekonominya kepada pihak terkait, yang berdampak pada akurasi data penerima bantuan. Padahal, perubahan status ini sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok KPM yang difasilitasi oleh pendamping PKH bertujuan untuk memberikan edukasi serta mengevaluasi pemanfaatan bantuan. Namun, efektivitas pertemuan ini masih bervariasi tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas fasilitasi yang

diberikan. Beberapa pendamping melaporkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat untuk hadir dalam kegiatan kelompok menjadi kendala dalam penyampaian informasi penting.

Peran pendamping PKH dalam proses ini sangat vital karena merekalah yang menjembatani antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Mereka tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan, tetapi juga berperan sebagai motivator dan pendidik sosial bagi keluarga miskin. Namun demikian, jumlah pendamping yang terbatas dan wilayah binaan yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Di samping itu, koordinasi antara pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, dan pihak pendamping masih perlu ditingkatkan. Ketidakselarasan data antara pemerintah daerah dan pusat menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam daftar penerima bantuan. Hal ini diperburuk dengan adanya sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam melakukan verifikasi silang data secara cepat dan akurat.

Dukungan teknologi informasi juga belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Biawu. Penggunaan sistem pencatatan manual masih dominan dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses input maupun pelaporan data. Optimalisasi aplikasi digital yang disediakan Kementerian Sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini, terutama dalam mendukung efisiensi dan transparansi pendataan.

Secara umum, pelaksanaan PKH di Kelurahan Biawu telah mencerminkan semangat pengentasan kemiskinan, namun perlu disempurnakan pada aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

### **Mekanisme Pengumpulan Data PKH**

Pengumpulan data dalam pelaksanaan PKH merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam menjamin ketepatan penerima manfaat. Di Kelurahan Biawu, proses ini dilakukan dengan menggunakan formulir survei dan pendataan langsung ke rumah-rumah warga yang tergolong miskin. Petugas lapangan mengandalkan informasi dari RT/RW dan perangkat kelurahan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat. Namun, mekanisme ini masih memiliki kelemahan dari sisi akurasi dan partisipasi masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan bersifat manual dan sangat bergantung pada kinerja petugas serta kejujuran informasi dari masyarakat. Hal ini menyebabkan rawannya kesalahan data seperti data ganda, data usang, atau tidak tercatatnya keluarga yang layak dibantu. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan keluarga mampu yang masuk dalam daftar penerima karena informasi yang diberikan tidak diverifikasi secara menyeluruh sejak awal.

Kendala lain dalam pengumpulan data adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pendataan. Banyak warga

---

yang tidak memahami bahwa keakuratan data sangat memengaruhi keberlanjutan bantuan yang mereka terima. Akibatnya, ketika data tidak sesuai atau bantuan dihentikan, muncul ketidakpuasan terhadap penyelenggara program meski akar permasalahannya adalah kurangnya pelibatan warga sejak proses awal.

Perlu adanya sistem pengumpulan data yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, di mana masyarakat turut dilibatkan dalam proses validasi dan pemutakhiran data. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program serta memperkecil peluang terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mekanisme pelaporan secara berkala perlu ditegaskan agar data selalu dalam kondisi mutakhir.

Proses pengumpulan data seharusnya didukung oleh sistem informasi yang memadai. Integrasi antara aplikasi berbasis digital dan mekanisme manual akan memudahkan proses validasi dan pemantauan. Penggunaan teknologi seperti GPS untuk mendeteksi lokasi rumah tangga dan aplikasi mobile untuk entri data langsung dari lapangan bisa mempercepat proses dan meningkatkan akurasi.

Untuk mendukung efektivitas pengumpulan data, pelatihan bagi petugas lapangan sangat diperlukan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan teknis, kemampuan komunikasi interpersonal, dan pemahaman kontekstual tentang masyarakat setempat. Dengan kapasitas yang memadai, petugas dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional.

Evaluasi berkala terhadap proses pengumpulan data juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Melalui evaluasi ini, kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Monitoring yang berkelanjutan memungkinkan sistem pendataan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

### **Verifikasi dan Validasi Data Penerima**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data. Di Kelurahan Biawu, proses ini dilakukan oleh pendamping PKH dan aparat kelurahan melalui kunjungan lapangan serta pengecekan dokumen. Namun demikian, proses ini masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah beban kerja yang tinggi karena keterbatasan jumlah petugas.

Verifikasi data sangat penting dalam mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan. Jika data yang diverifikasi tidak valid, maka akan berakibat pada pemberian bantuan kepada pihak yang tidak layak, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan terstandar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Sosial.

Faktor sosial juga kerap menjadi kendala dalam proses verifikasi. Adanya relasi kekeluargaan antara pendamping dengan masyarakat dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Untuk menghindari hal ini, seharusnya proses verifikasi melibatkan pihak independen atau setidaknya dilakukan oleh petugas lintas wilayah.

Dokumen administratif seperti Kartu Keluarga, KTP, serta bukti kepemilikan anak sekolah dan peserta BPJS menjadi instrumen utama dalam proses verifikasi. Namun, masih banyak keluarga yang tidak memiliki dokumen lengkap sehingga menyulitkan proses tersebut. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi kepemilikan dokumen agar tidak menjadi penghambat akses terhadap bantuan sosial.

Sistem pelaporan hasil verifikasi juga perlu diperbaiki. Pelaporan secara manual membutuhkan waktu lama dan rawan kesalahan. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi memungkinkan hasil verifikasi dapat langsung diproses dan dikoreksi bila ditemukan ketidaksesuaian. Ini juga akan memudahkan monitoring oleh pihak pusat.

Kualitas verifikasi sangat bergantung pada komitmen dan integritas petugas lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya kode etik dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan proses berjalan secara objektif dan bebas intervensi. Mekanisme pelaporan pelanggaran juga harus disediakan agar masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap proses ini.

Secara keseluruhan, verifikasi data merupakan tahapan krusial dalam memastikan efektivitas program bantuan sosial. Ketepatan proses ini akan menentukan keberhasilan distribusi bantuan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam pelaksanaan PKH.

### **Pembaruan Data dan Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat**

Pembaruan data merupakan proses penting dalam menjaga validitas data penerima manfaat PKH. Di Kelurahan Biawu, proses pembaruan ini masih mengalami kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Banyak warga yang tidak melaporkan perubahan kondisi ekonominya, baik yang membaik maupun yang memburuk, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pemberian bantuan.

Minimnya pembaruan data membuat data menjadi usang dan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya keluarga mampu yang masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang baru tidak terdata. Padahal, prinsip keadilan dalam program sosial mensyaratkan bahwa bantuan harus diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Proses pembaruan data juga belum dilakukan secara berkala dan sistematis. Dalam banyak kasus, pembaruan hanya dilakukan apabila terdapat instruksi dari pusat atau adanya keluhan masyarakat. Seharusnya, pembaruan dilakukan secara proaktif setiap semester atau tahun, dengan melibatkan partisipasi warga dan pendamping PKH secara kolektif.

Pendamping memiliki peran penting dalam mendorong pembaruan data, tetapi beban kerja yang tinggi dan wilayah kerja yang luas menghambat efektivitas mereka. Diperlukan tambahan sumber daya manusia dan pembagian wilayah kerja yang proporsional agar setiap KPM dapat dimonitor dengan lebih intensif dan personal.

Pembaruan data juga harus didukung oleh sistem informasi yang responsif. Aplikasi digital yang dirancang oleh Kementerian Sosial perlu dilengkapi dengan fitur pembaruan otomatis dan akses publik agar masyarakat bisa turut serta dalam proses pemutakhiran. Transparansi dalam pembaruan akan mendorong rasa keadilan dan meningkatkan legitimasi program.

Dalam konteks dinamika sosial ekonomi, masyarakat cenderung mengalami perubahan kondisi secara cepat akibat fluktuasi ekonomi, bencana, atau perubahan status pekerjaan. Oleh karena itu, sistem PKH harus mampu merespons perubahan ini dengan cepat. Fleksibilitas kebijakan pembaruan menjadi penting untuk menjaga akurasi dan keberlanjutan program.

Dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas pembaruan data, maka program PKH dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memastikan bahwa intervensi sosial yang dilakukan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

## SIMPULAN

Kesimpulan, mekanisme pendataan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pelaksanaan pengumpulan data, ketidaktepatan dalam verifikasi, serta keterlambatan pembaruan informasi penerima manfaat. Ketiga komponen tersebut menjadi faktor penentu dalam menjamin akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial, namun masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural di lapangan. Peran pendamping, koordinasi lintas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat belum dimaksimalkan, sementara dukungan teknologi informasi masih terbatas dalam mendukung efisiensi sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan menyeluruh melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi pendataan yang terintegrasi, serta pembentukan mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala agar bantuan PKH dapat tersalurkan secara adil, tepat guna, dan berkelanjutan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Y. I., & Hardiyanti, W. E. (2023). Pembaharuan tata kelola data melalui sistem informasi Gorontalo Satu Data. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 171. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2443>
- Djumura, N. P., Panigoro, M., Maruwae, A., & Popoi, I. (2022). Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bubeya. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 33–42.
- Dr. Bhavesh A. Prabhakar. (2023). Faktor penunjang keberjalanan dalam program PKH. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Verifikasi data. 3(2), 91–102.

- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2019). Miles & Huberman. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 30–34.
- Kaunang, W. P. J., Saviola, B. J., Moku, J. M., & Wowor, S. T. (2022). Pengumpulan dan pengolahan data dalam sistem surveilans kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 1–5.
- Kadir, A. (2015). *Dasar-dasar pemrograman dan basis data*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Khusnusyiva, K. (2023). Peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam verifikasi dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat di desa .... 781–793.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia II. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Lukman, L., & Susilo, A. T. (2019). Sistem informasi dan verifikasi pengolahan data guru sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. *Jurnal Ilmiah Betrik*, 10(03), 150–160.
- “Pedoman Umum PKH.” (2007). <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>
- “Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53.
- Regency, I. E., Susanti, G., Edy, N., & Pauzi, R. (2023). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan di Kabupaten Enrekang. 3(1), 1–20.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Ahmad Gunawan. (2020). Teknik pengumpulan data II. 3(1), 39–47.
- Rumina. (2024). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 157–177.
- Silaban, E. (2023). Efektivitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. *Administrasi Publik*.
- Siregar. (2022). Konsep kemiskinan. 2005–2003, 8.5.2017, 7777.
- Sugiyono. (2016). *Pendekatan penelitian jhsni*. (2017:9), 1–23.
- Suwinta, A. E., & Prabawati, I. (2016). Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Publik*, 1, 1–10.
- T. Thalib. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. VII, 39–48.
- Ummah, M. S. (2019). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate Jakarta Timur. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wardani, A., Putri, E., Qiyamulael, K., Itsnaini, N. L., Rofiah, K., Astuti, S. D., Pradipta, Z., Mada, U. G., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2025). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap akses wajib belajar bagi rumah tangga. 3(6).
- Yuliani, N. (2020a). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Padang Mutung Kecamatan. *Academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/107094126/385607947.pdf>